KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Tak cukup penundaan ketenagakerjaan
Tanggal : Jumat, 24 April 2020
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

RUU CIPTA KERJA

kompas, Jumat 24 April 2020, hal.2

Tak Cukup Penundaan Ketenagakerjaan

JAKARTA, KOMPAS — Pimpinan DPR meminta Badan Legislasi DPR menunda pembahasan kluster ketenagakerjaan pada Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, permintaan ini dinilai belum cukup. Seharusnya penundaan pembahasan dilakukan menyeluruh pada regulasi yang dibentuk dengan metode *omnibus law* tersebut.

Permintaan penundaan itu disampaikan Ketua DPR dari PDI-P Puan Maharani, Kamis (23/4/2020).

"Atas nama ketua dan pimpinan DPR, saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan pembahasan *omnibus law* Cipta Kerja, untuk kluster ketenagakerjaan, kami meminta kepada Baleg (Badan Legislasi) untuk menunda pembahasannya," kata Puan.

Selain karena saat ini semua pihak sedang fokus pada penanganan Covid-19, penundaan itu juga agar DPR bisa lebih banyak menyerap masukan masyarakat terutama dari kelompok buruh.

Ketua Baleg DPR yang juga Ketua Panitia Kerja RUU Cipta Kerja DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, pembahasan kluster ketenagakerjaan memang sudah direncanakan baru akan dilakukan saat kondisi pandemi telah berakhir.

Ketua Kelompok Fraksi Golkar di Baleg DPR, Firman Subagyo, menyebutkan, hal tersebut sudah jadi kesepakatan di Baleg DPR.

Adapun untuk materi lain di RUU akan tetap dibahas. Ia menilai pembahasan RUU tidak boleh berhenti karena *omnibus law* tersebut jadi solusi mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Meredam aksi buruh

Namun, pengajar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Padang, Charles Simabura, menilai, penundaan yang terbatas pada kluster ketenagakerjaan hanya strategi DPR untuk mencegah aksi buruh menolak RUU Cipta Kerja yang direncanakan digelar pada 30 April mendatang.

Seharusnya bukan hanya kluster ketenagakerjaan, tetapi RUU Cipta Kerja yang ditunda pembahasannya. Sebab, persoalan di RUU tak hanya di kluster ketenagakerjaan, tetapi tersebar di sepuluh kluster lain seperti lingkungan hidup.

Dengan banyaknya persoalan, DPR harus menyerap lebih banyak masukan publik. Ini tidak mungkin dilakukan ketika rakyat sedang bergulat menghadapi pandemi dan dampaknya. (REK/BOW/ICH)